



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIE SUJITO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN ALUMNI**
3. NHK : **804014**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.935.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/180 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
2. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. Tanah Seluas 246 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/190 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 545.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **885.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, VESPA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **---**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	550.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.370.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.370.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.